

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Redi, 2020, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

A. Arifianto, 2017, *Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Bayu Dwi Anggono, 2020, *Pemilu dan Demokrasi Lokal: Mewujudkan Kedaulatan Rakyat di Daerah*, Malang: Setara Press.

Bivitri Susanti, 2021, *Krisis Demokrasi dan Reformasi Hukum Pemilu*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

Denny Indrayana dan Refly Harun, 2018, *Demokrasi dan Hukum: Tafsir Konstitusional terhadap Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Denny Indrayana, 2020, *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Jakarta: Kompas.

Dewi Kanti, 2022, *Pemilu dan Ketimpangan Akses Politik*, Bandung: Forum Demokrasi.

Dwi Yulianti, 2022, *Hukum Administrasi Negara dan Pilkada di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Edi Suharto, 2021, *Demokrasi Lokal dan Mekanisme Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak*, Bandung: Refika Aditama.

Fahrul Rozi, 2021, *Asas dan Prinsip dalam Hukum Administrasi Negara Modern*, Bandung: Refika Aditama.

Fadjroel Rachman, 2018, *Demokrasi Tanpa Rakyat: Negara, Kekuasaan, dan Representasi*, Yogyakarta: Insist Press.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.

Feri Amsari, 2022, *Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu: Tinjauan Teoritis dan Praktik Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hani Adhani, 2019, *Sengketa Pilkada Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mitra Buana Media.

Kadaruddin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*., Semarang; Formaci.

Miriam Budiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Muslim Mufti dan Diah Durrotun Naafisah, 2013, *Teori-Teori Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Setia.

Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon, 2018, *Hukum Administrasi dan Wewenang Pemerintahan*, Surabaya: LaksBang Pressindo.

- Ridwan Arifin, 2019, *Hukum Pilkada di Indonesia: Kajian atas Perubahan UU Pilkada dan Implikasinya terhadap Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. W. Effendi, 2019, *Partisipasi Politik dalam Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siti Zuhro, 2018, *Demokrasi Lokal dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS.
- Syamsuddin Haris, 2014, *Partai Politik dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Titik Anggraini, 2021, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Menjaga Integritas dan Keadilan Elektoral*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Triwulan dan Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyudi Djafar, 2021, *Pemilu dan Demokrasi Konstitusional: Evaluasi terhadap Calon Tunggal dalam Pilkada*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Yance Arizona, 2018, *Politik Hukum Demokrasi Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS.

DATA INSTANSI

- Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, 2024. *Keputusan KPU Banjarbaru tentang Diskualifikasi Pasangan Calon dan Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2024*. Banjarbaru: KPU Banjarbaru.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, 2025, *Laporan Hasil Evaluasi Sosialisasi PSU Pilkada 2024–2025*, Banjarbaru: KPU Banjarbaru.

JURNAL

- Adi Nugroho, 2021, Kasus Pilkada Kota Banjar Baru: Refleksi atas Penyelenggaraan Pilkada dan Mekanisme Kolom Kosong,” *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, Volume 6 Nomor 1.
- Afidah Fauziah, 2023, *Perlindungan Hak Pilih dalam Sistem Pemilu Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 20 Nomor 2.
- Azis Setyagama, Purwanto, Rizqy Miftahul Huda, 2021, *Implikasi Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 (studi pada KPU Kabupaten Pasuruan)*, Jurnal IUS Volume 9 Nomor 2.
- A. Arfianto, 2021, *Model Demokrasi dan Relevansinya dengan Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Volume 12 Nomor 1.
- Bayu Dwi Anggono, 2022, *Membangun Demokrasi Substansial dalam Pilkada*, Jurnal Hukum IUS, Volume 10 Nomor 2.

- Burhanuddin Muhtadi, 2017, *Demokrasi Tanpa Pilihan: Problematika Calon Tunggal dalam Pilkada*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 21 Nomor 2.
- Cornelis Lay, 2020, *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?*, Jurnal Masyarakat dan Politik, Volume 29 Nomor 2.
- Dedi Mulyadi, 2024, *Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2024*, Jurnal Hukum *Ius Publicum*.
- Denny Indrayana, 2021, *Demokrasi dan Pemilu: Antara Praktik dan Prinsip Konstitusi*, Jakarta: Gramedia.
- Dini A. Rahmawati, 2023, *Good Governance dan Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 9 Nomor 2.
- Diana Dwi Aprilianti, Muhammad Mashuri, Humiati, 2024, *Analisis Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum.
- Dwi Kusuma, 2023, *Kelemahan Regulasi Teknis Pilkada dan Implikasinya terhadap Hak Pilih Rakyat*, Jurnal Demokrasi dan Hukum, Volume 9 Nomor 1
- Dwi Purnomo, 2022, *Putusan KPU Banjar Baru dan Implikasinya terhadap Keabsahan Pilkada*, Jurnal Ilmu Politik Indonesia, Volume 8 Nomor 2.
- E. Nugroho dan F. Rahman, 2021, *Dinamika Pilkada dan Fenomena Calon Tunggal: Studi Kasus Kota Banjar Baru*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Volume 9 Nomor 2.
- Fitriani, L., 2023, *Tantangan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu dalam Konteks Calon Tunggal*, Jurnal Hukum dan Demokrasi, Volume 11 Nomor 2.
- Fritz Edward Siregar, 2022, *Hukum Pemilu dan Etika Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Hadar Nafis Gumay, 2020, *Pemilu Berintegritas dan Tantangan Elektoral di Indonesia*, Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi.
- Hariyanto, 2018, *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Volume 1 Nomor 1.
- I Nyoman Artayasa, 2019, *Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Cakrawati, Volume 2 Nomor 1.
- Kusnandar Marsono Putro, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily dan Suharno, 2024, *Implementasi Sistem Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya*, Jurnal Bevinding, Volume 2 Nomor 2.
- Luthfi Makhasin, 2018, *Pemilu Lokal dan Tantangan Demokrasi di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas*, Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, Volume 9 Nomor 2.
- M. Dharmaputra dan I. N. Prananta, 2019, *Dinamika Politik Lokal dan Dampaknya terhadap Kompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, Jurnal Politik dan Pemerintahan, Volume 7 Nomor 1.

- N. Fitriani dan A. Supriyadi, 2021, *Evaluasi Regulasi Pilkada dan Implikasinya terhadap Demokrasi Lokal di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 10 Nomor 2.
- Rahmat Hidayat, 2021, *Gugatan Mahkamah Konstitusi atas Kasus Pilkada dengan Calon Tunggal*, Jurnal Hukum dan Demokrasi, Volume 7 Nomor 1.
- Sabrina, Ronny, dan Dani, 2023, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal*, Lex Administratum, Volume 11 Nomor 4.
- S. Lestari, 2022, *Evaluasi Kebijakan KPU dalam Penanganan Calon Tunggal: Studi Kasus Kota Banjar Baru*, Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan Daerah, Volume 5 Nomor 3.
- Supriyadi, 2019, *Keadilan Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 49 Nomor 1.
- Teguh Ilham, 2020, *Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume 12 Nomor 2.
- Titi Anggraini, 2020, *Problem Calon Tunggal dalam Demokrasi Lokal*, Jurnal Konstitusi, Volume 17 Nomor 3.
- Zam Zam Lukmanul Jamil et al., 2025, *Pendidikan Demokrasi di Era Globalisasi: Tantangan dan Peluang*, Edukasi: Jurnal Pendidikan, Volume 22 Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi Undang-Undang Pilkada.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 318/PHP.KOT-XXII/2025 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru 2024.

INTERNET

<https://www.kompas.id/artikel/pilkada-barito-utara-dan-konsekuensi-demokrasi> diakses pada tanggal 22 Mei 2025

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/partisipasi-pemilih-dalam-psu-banjarbaru-rendah> diakses pada tanggal 19 Juli 2025.